

BUKU PROFIL DATA GENDER DAN ANAK TAHUN 2021

BUKU PROFIL DATA GENDER DAN ANAK ^{TAHUN} 2021



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



PRINT & DESIGN BY ARTHEK



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “Profil Gender dan Anak Tahun 2021” telah dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dapat disusun karena adanya dukungan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dan OPD terkait serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman.

Penulis menyadari bahwa didalam penyelenggaraan pembangunan yang perspektif gender masih adanya GAP (Kesenjangan) yang ada. Sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum tercapai secara optimal. Dalam penyusunan Buku ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerja sama dalam menyusun penulisan buku ini.
2. Bapak/Ibu OPD terkait yang terkait telah memberikan berbagai dukungan serta sumbagsih dalam penyempurnaan buku ini.
3. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksana penulisan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga semua saran beserta masukan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan pahala disisi-Nya. Penulis menyadari buku ini jauh dari kesempurnaan dari yang diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Pariaman, September 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman



SYAFRIWAL, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621014 198811 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Sumber Data	4
D. Sistematika Penyajian	5

BAB II Gambaran Umum Kondisi Wilayah

A. Geografis dan Astronomis	9
B. Sejarah	10
C. Sosial dan Budaya	12
D. Biografi Menteri PP & PA	13

BAB III Struktur Penduduk

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	14
B. Penduduk Anak Berdasarkan Jenis Kelamin	15
C. Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin	15

BAB IV Kesehatan

A. Akses terhadap Air Minum.....	17
B. ASI Eksklusif	18
C. HIV/AIDS	18
D. Angka Kematian Bayi (AKB)	19
E. Angka Kematian Ibu	20
F. Status Gizi	21
G. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	22
H. Keluarga Berencana	24

BAB V Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar	27
B. Angka Partisipasi Sekolah	29
C. Angka Partisipasi Murni	32
D. Angka Putus Sekolah	34
E. Sertifikasi Guru	36

BAB VI Ketenagakerjaan

A. Tenaga Kerja Migran	39
B. Pekerja Sektor Formal	39
C. Pekerja Sektor Informal	40
D. Keanggotaan Koperasi	41
E. Serikat Pekerja	42

BAB VII Politik dan Pengambilan Keputusan

A. Partisipasi di Lembaga Legislatif	44
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	44
B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif	46
1. Jaksa	46
2. Hakim	46
3. Polisi	47
C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif	48
1. Camat	48
2. Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakt)	48
3. Wali Nagari	49

BAB VIII Kelangsungan Hidup Anak dan Lingkungan

A. Perlindungan Anak	50
1. Lingkungan Keluarga dan Pengasuha Alternatif	50
2. Respon Kasus Korban	51
3. Respon Kasus Pelaku	52
B. Perubahan Iklim	53
C. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan	54

BAB IX Penutup

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan	9
Tabel 8.1 Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	10
Gambar 2.2 Menteri PP & PA	13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Grafik 3.2 Penduduk Anak Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Grafik 3.3 Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Grafik 4.1 Persentase Sara Air Minum	17
Grafik 4.2 Jumlah Pemberian ASI Eksklusif	18
Grafik 4.3 Penularan HIV/AIDS	19
Grafik 4.4 Angka Kematian Bayi	20
Grafik 4.5 Angka Kematian Ibu	21
Grafik 4.6 Status Gizi	22
Grafik 4.7 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	23
Grafik 4.8 Keluarga Berencana (KB)	25
Grafik 5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	28
Grafik 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	28
Grafik 5.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	29
Grafik 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun)	30
Grafik 5.5 Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun)	31
Grafik 5.6 Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun)	31
Grafik 5.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD	33
Grafik 5.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	33
Grafik 5.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	34
Grafik 5.10 Angka Putus Sekolah SD	35

Grafik 5.11 Angka Putus Sekolah SMP	35
Grafik 5.12 Angka Putus Sekolah SMA	36
Grafik 5.13 Sertifikasi Guru SD	37
Grafik 5.14 Sertifikasi Guru SMP	37
Grafik 5.15 Sertifikasi Guru SMA	38
Grafik 6.1 Tenaga Kerja Migran	39
Grafik 6.2 Pekerja Sektor Formal	40
Grafik 6.3 Pekerja Sektor Informal	41
Grafik 6.4 Keanggotaan Kopreasi	41
Grafik 6.5 Serikat Pekerja	42
Grafik 7.1 Anggota DPRD Tahun 2014 dan 2019	45
Grafik 7.2 Jaksa	46
Grafik 7.3 Hakim	47
Grafik 7.4 Polisi	47
Grafik 7.5 Camat	48
Grafik 7.6 Tim Baperjakat	49
Grafik 7.7 Wali Nagari	49
Grafik 8.1 Anak Panti dan Non Panti	51
Grafik 8.2 Respon Kasus Korban	52
Grafik 8.3 Respon Kasus Pelaku	52
Grafik 8.4 Perubahan Iklim di Padang Pariaman	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merupakan suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki maupun perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Laki-laki dan perempuan secara seksual memang berbeda begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya di masyarakat dapat di sejajarkan dengan batasan-batasan tertentu.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam prosesbermasyarakat dan bernegara.

Permasalahan gender disebabkan karena masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan,

kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bias gender diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi di masa mendatang.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah bahwa harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Hasil Proyeksi Sensus Penduduk, Pada Tahun 2020 Penduduk Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan mencapai 431.272 Jiwa, terdiri 203.535 laki-laki dan 209.737 Perempuan. Kabupaten Padang Pariaman terdiri 17 Kecamatan

diantaranya, Penduduk yang terbanyak ialah kecamatan Batang Anai sebanyak 47.128 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah yaitu kecamatan Padang Sago sebanyak 8.37 Jiwa.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak maka diperlukan data terpilah sebagai sumber informasi dalam analisis gender dan pemenuhan hak anak. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pergantian Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data informasi perencanaan Pembangunan Daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan dari segi geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hal diatas maka disusunlah buku “ Profil Gender dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2021 ” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat memberikan informasi secara jelas mengenai keadaan serta kondisi perempuan maupun laki-laki yang terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan, sektor publik kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak yang berada di Sumatera Barat yang dilihat dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak mengenai permasalahan sosial, lainnya.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam buku ini berasal dari berbagai macam instansi di antaranya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas LHPKPP, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Sistematika Penyajian

BAB I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Sumber Data
- d. Sistematika Penyajian

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Wilayah

- a. Geografis dan Astronomis
- b. Sejarah
- c. Sosial dan Budaya
- d. Biografi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III : Kependudukan

- a. Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
- b. Penduduk Anak di Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2020

- c. Penduduk Lansia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

BAB IV : Kesehatan

- a. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- b. Cakupan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- c. Cakupan Pertolongan Persalinan menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- d. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) kesarana pelayanan Kesehatan Tahun 2020.
- e. Pemberian Imunisasi Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2020.
- f. Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe).
- g. Penderita HIV/AIDS menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- h. Peserta/Akseptor KB menurut Kecamatan dan

Jenis Kelamin Tahun 2020.

BAB V : Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kecamatan Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
- d. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA Tahun 2020.
- e. Sertifikasi Guru di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

BAB VI : Bidang Ketenagakerjaan

- a. Tenaga Kerja Migran
- b. Pekerja di Sektor Formal
- c. Pekerja di Sektor In Formal
- d. Keanggotaan Koperasi
- e. Serikat Pekerja

BAB VII : Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. Keterwakilan dilembaga Legislatif
 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
- b. Partisipasi di Lembaga Yudikatif
 1. Jumlah Jaksa di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
 2. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.
- c. Partisipasi Perempuan dilembaga Eksekutif
 1. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
 2. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Padang Pariaman Tahun 2020.
 3. Wali Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

BAB VIII : Kelangsungan Hidup Anak dan Lingkungan

- a. Perlindungan Anak
- b. Perubahan Iklim

c. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan

BAB IX : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

A. Geografis dan Astronomis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu kabupaten yang termasuk dalam Sembilan belas wilayah yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km², dengan panjang garis pantai 42,11 Km, yang dimana memiliki batasan diantaranya.

- Utara : Kabupaten Agam
- Selatan : Kota Padang
- Barat : Samudera Indonesia
- Timur : Kabupaten Solok & Kabupaten Tanah Datar

Secara Astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak pada 0011'-0049' Lintang Selatan (LS) dan antara 98036'-100028' Bujur Timur (BT). Kabupaten Padang Pariaman terbagi atas tujuh belas Kecamatan diantaranya

:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan yang ada
di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Batang Anai	180,39 Km ²
2	Lubuk Alung	111,63 Km ²
3	Sintuk Toboh Gadang	25,56 Km ²
4	Ulakan Tapakis	38,85 Km ²
5	Nan Sabaris	29,12 Km ²
6	2 X 11 Enam Lingkung	36,25 Km ²
7	Enam Lingkung	39,20 Km ²
8	2 X 11 Kayu Tanam	228,70 Km ²
9	VII Koto	90,73 Km ²
10	Patamuan	53,05 Km ²
11	Padang Sago	32,06 Km ²
12	V Koto Kampung Dalam	61,41 Km ²
13	V Koto Timur	64,80 Km ²

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel diatas, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah

paling luas, yakni 228,70 Km², sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Sintuk Toboh Gadang dengan luas wilayah 25,56 Km².

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

B. Sejarah

Padang Pariaman sebelumnya berasal dari Pagaruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk. I Sumbar, 1978:7). Menurut Tokoh Sumbar Buya Hamka mengatakan nama Pariaman sendiri berasal dari kata bahasa arab, “Barri aman” yang artinya: tanah daratan aman dan sentosa (Suryadi, 2004 : 92). Dalam istilah lainnya kata Pariaman berasal dari “parik nan aman” yang artinya pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di Bandar-bandar rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaiditanjung, 2006 :1).

Sebelumnya orang Eropa datang ke kawasan rantau Pariaman, kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini seperti pelabuhan Pariaman dan Tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujard (Suryadi, 2004 : 93).

Setelah kemerdekaan, daerah administrasi periode kolonial Pariaman, *Tikoen de danau distristen*, kemudian disahkan menjadi Kabupaten PadangPariaman berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 dengan Ibu Kota Pariaman. Pada awalnya, kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan komisaris pemerintah di Sumatera No. 81/ Kom / U / 1948 Tentang pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang berasal dari sebelas kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kota, Mentawai dan Nagari-nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari tujuh belas wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi empat belas Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 No. 10 / G.M / S.T.G / 49, dikurangi dengan daerah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Panggilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provisi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 dengan Nomor 65/G.P/50, Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun1948 adalah Mr. BA. Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari yang telah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120 / 453 / PEM – 2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari sampai

sekarang.

C. Sosial dan Budaya

Seperti halnya Minangkabau memiliki beragam macam suku dan budaya diantaranya menganut sistem matrilineal (garis keturunan yang berasal dari kaum perempuan / Ibu). Pada awalnya pembentukan budaya Minangkabau yang terbagi atas dua orang Datuk, yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan, dimana sebelumnya terbagi atas empat suku indukdari dua kelurahan diantaranya, Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Koto, Suku Piliang.

Semakin berkembangnya zaman, suku yang ada di Minangkabau telah terbagi beragam macam suku yaitu, Suku Guci, Suku Jambak, Suku Sikumbang, Suku Tanjung dan beragam macam suku lainnya yang ada di Minangkabau. Pada umumnya orang Minang merupakan pemeluk agama Islam terbanyak di Propinsi Sumatera Barat yang khususnya Kabupaten Padang Pariaman yang dimana “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” (Adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-Qur’an) yang merupakan cerminan adat orang Minang yang berlandaskan Agama Islam.

Dari hal tersebut, Minangkabau tidak terlepas dari masing-masing peran dalam Adat diantaranya, Niniak Mamak (Penghulu), Alim Ulama (Suluah Bendang dalam Nagari) dan Cadiak Pandai (Cendikiawan). Ketiga pemimpin tersebut memiliki bagian yang dipimpinnya masing-masing. Niniak Mamak (Penghulu) memimpin anak dan kemenakan atau yang dikenal dengan istilah Anak dipangku Kamanakan dibimbiang, Alim Ulama mengajarkan Ilmu Agama yang diajarkan terhadap kaum nagari, sedangkan Cadiak Pandai yaitu memberikan Ilmu yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Ketiga pemimpin tersebut dikenal dengan istilah “Tungku Tigo Sajaringan”.

Sampai sekarang adat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan secara bersama baik secara musyawarah maupun

mufakat atau yang dikenal dengan istilah Bajanjang Naik Batanggo Turun artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur yang telah ditetapkan agar tertib dan terlaksananya dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sinegritas antara adat dan berbagai elemen lainnya di Sumatera Barat, Terutaman di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Biografi Menteri PP & PA

I Gusti Ayu Bintang Darmawati adalah perempuan berdarah Bali menjadi menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. I Gusti Ayu Bintang Darmawati lahir di Denpasar, 26 November 1968. Ia merupakan istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. I Gusti Ayu Bintang Darmawati menikah dengan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan dikaruniai 1 orang anak.

Bintang sangat aktif dalam organisasi yaitu ditunjuk sebagai Ketua Bidang Manajemen Usaha di Dewan Kerajinan Nasional (Dekarnas) selain itu Bintang memiliki kegemaran di bidang olahraga, khususnya tenis meja, bahkan Bintang ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMS) pada tahun 2015 – 2019.

Gambar 2.2 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

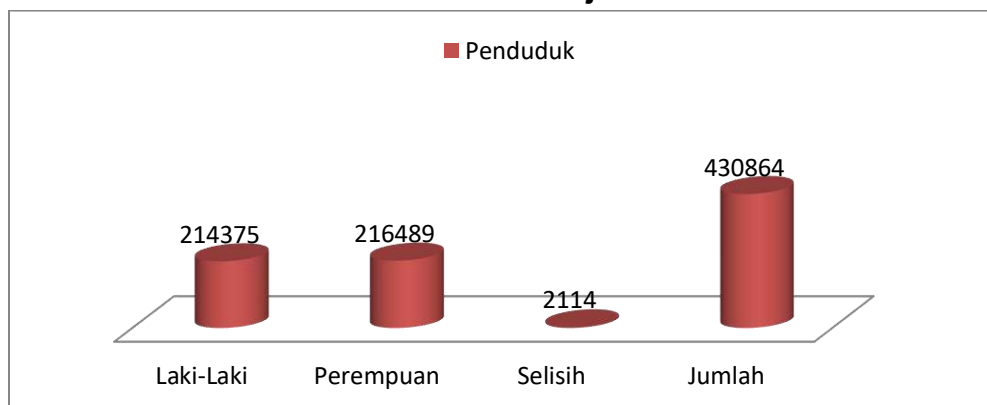
BAB III STRUKTUR PENDUDUK

Kependudukan merupakan hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran. Mobilitas dan kuantitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 431.224 ribu jiwa terdiri dari 214.735 ribu laki-laki dan 216.489 ribu jiwa perempuan. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1
Penduduk berdasarkan jenis kelamin



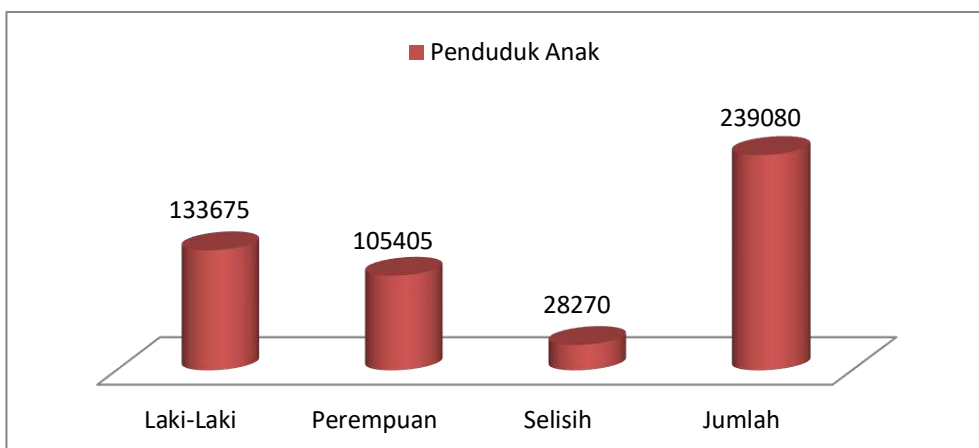
Sumber : Profil DISDUKCAPIL Tahun 2020

Dari grafik di atas diketahui jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 430.864 jiwa diantaranya 214.375 laki-laki dan 216.489 perempuan dengan selisih jumlah penduduk 2114 jiwa.

B. Penduduk Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk anak di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 239.080 ribu jiwa terdiri dari 133.675 ribu laki-laki dan 105.405 ribu jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
Penduduk Anak berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Profil DISDUKCAPIL Tahun 2020

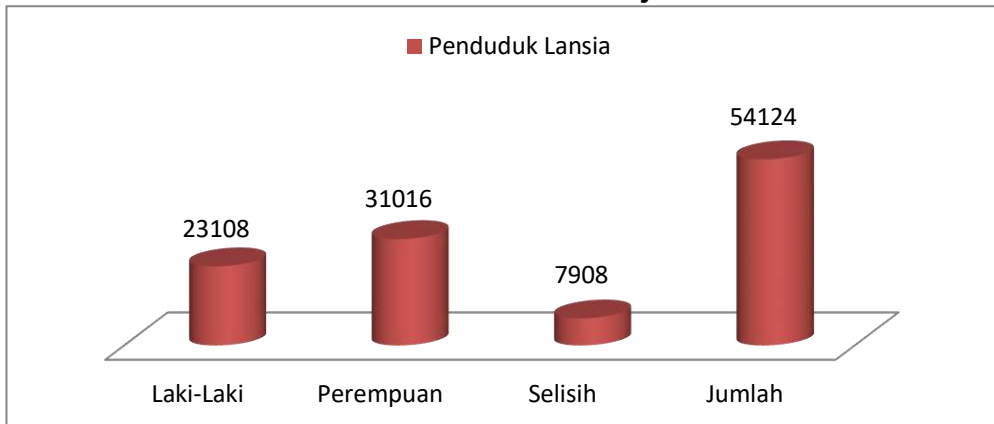
Dari grafik di atas diketahui jumlah penduduk anak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 239.080 jiwa diantaranya 133.675 laki-laki dan 105.405 perempuan dengan selisih jumlah penduduk 28.270 jiwa.

C. Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk lansia di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 54.124 ribu jiwa terdiri dari 23.108 ribu laki-laki dan 31.016 ribu jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-

laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3
Penduduk Lansia berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Profil DISDUKCAPIL Tahun 2020

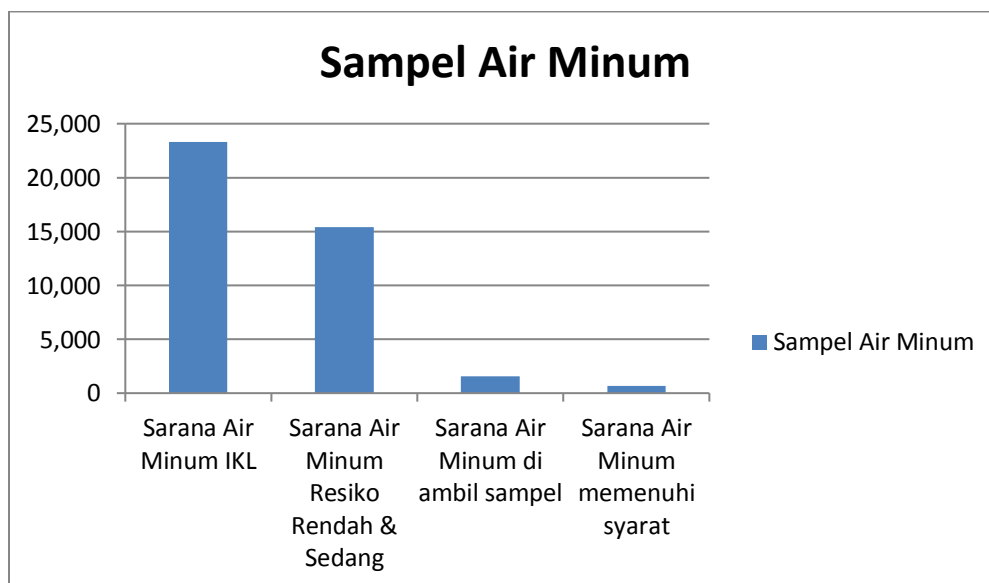
Dari grafik di atas diketahui jumlah penduduk lansia yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 54.124 jiwa diantaranya 23.108 laki-laki dan 31.016 perempuan dengan selisih jumlah penduduk 7.908 jiwa.

BAB IV KESEHATAN

A. Akses terhadap Air Minum

Presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan oleh tenaga diwilayah kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Jumlah sarana air minum adalah 84.717 sarana. Jumlah sarana air minum di Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) adalah 23.332 (27,5 %) sarana. Jumlah sarana air minum yang diambil sampel adalah 1.588 sarana (1,9%) yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 700 sarana atau 44,1 % dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1
Persentase Sarana Air Minum

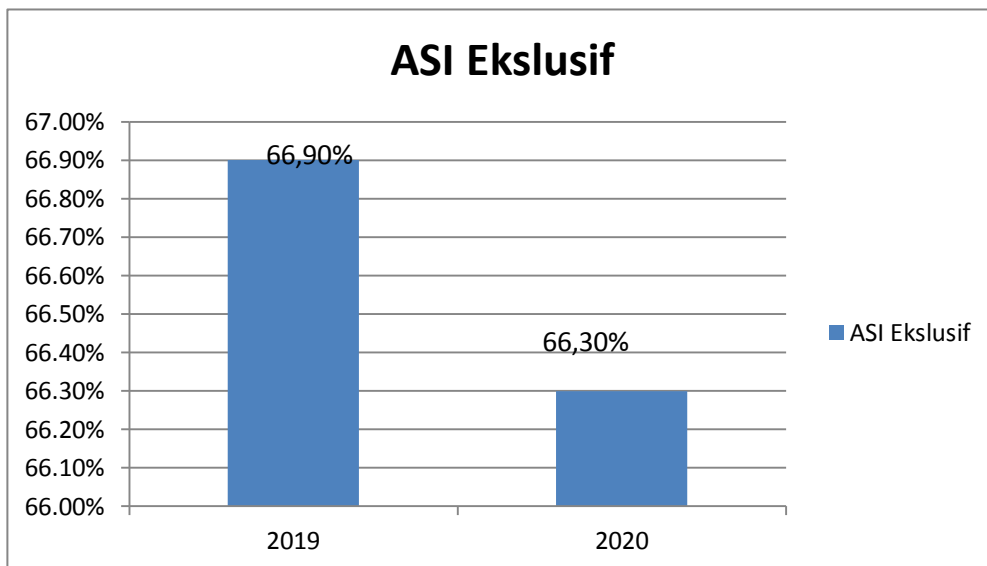


Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

B. ASI Eksklusif

ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa diberikannya makanan dan minuman lain kepada bayi dari lahir sampai beranjak usia 6 bulan, kecuali pemberian vitamin dan obat-obatan. Air Susu Ibu (ASI) merupakan (Kolostrum) makanan yang terbaik dan sempurna untuk bayi, karena mengandung semua gizi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bayi mengandung protein serta vitamin A yang dapat meningkatkan imunitas bayi sehingga terhindar dari penyakit. Pemberian ASI Eksklusif pada Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.2
Jumlah Pemberian ASI Eksklusif
Tahun 2019-2020



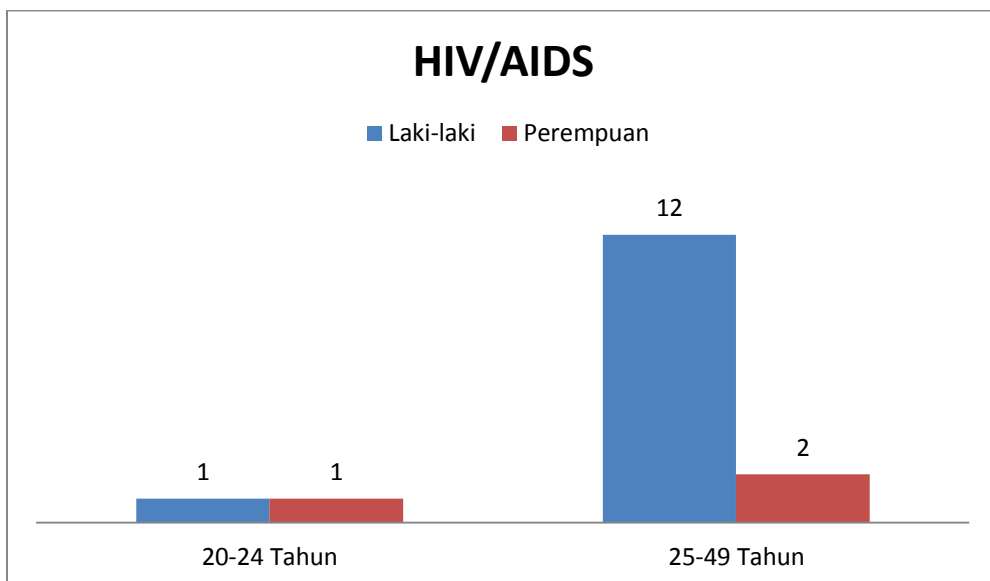
Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

C. HIV/AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dapat menyerang sistem imunitas seseorang, dimana penderita mengalami penurunan daya

tahan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi dari vektor penyakit. Penularan HIV dapat melalui cairan tubuh ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang terjadi melalui penggunaan jarum suntik, transfusi darah, pergaulan bebas, serta dari ibu ke bayi dalam proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Data penyebaran HIV/AIDS dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.3
Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat diketahui jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi diderita oleh usia 25 – 49 tahun dengan persentase laki-laki 12 orang dan perempuan 2 orang.

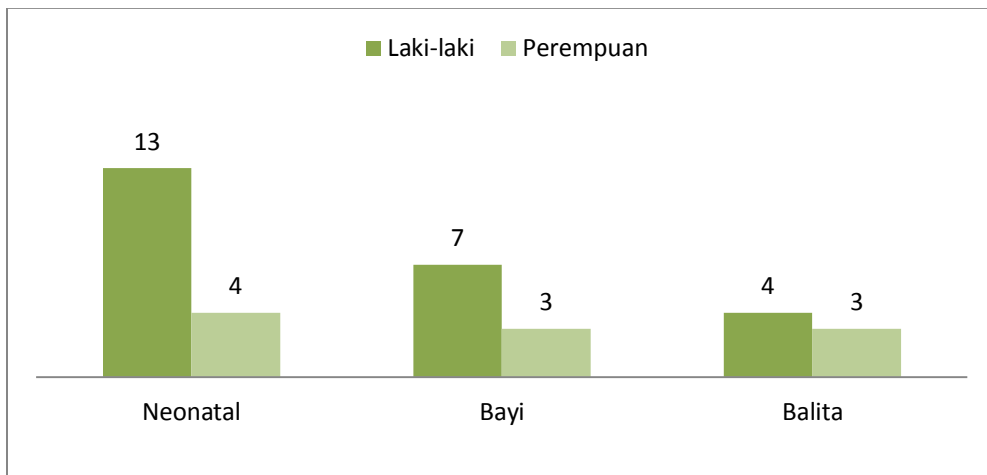
D. Angka Kematian Bayi (AKB)

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan

faktor yang kurang dominan. Menurunnya AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2020 jumlah kematian Bayi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 4.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

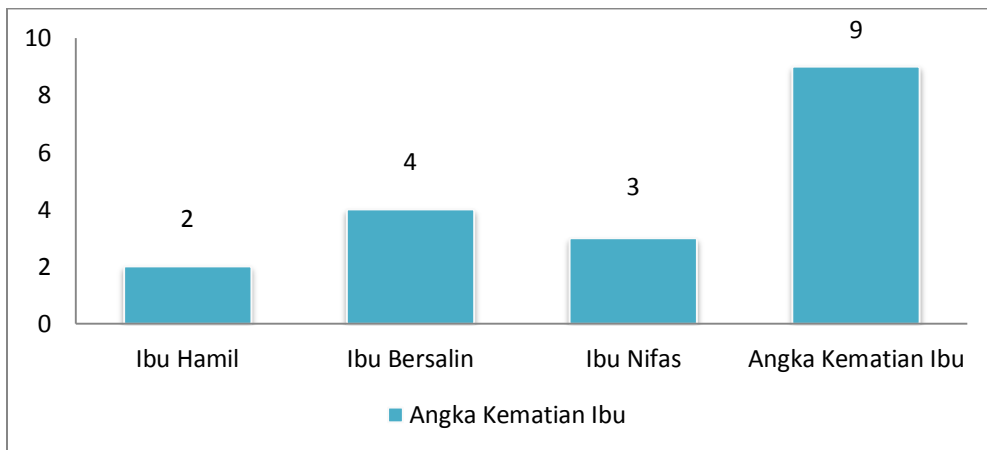
Dari grafik di atas diketahui jumlah kematian Neonatal 17, Bayi 10, dan 7 Balita. Berbagai faktor dapat menyebabkan peningkatan kematian terhadap bayi, hal ini disebabkan kematian bayi sangat dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan dan kemiskinan, sehingga asupan gizi tidak tercukupi.

E. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu menjadikan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Dimana Angka

Kematian terhadap Ibu disebabkan karena terganggunya proses kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Angka Kematian terhadap Ibu menurut DINKES Padang Pariaman dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 4.5
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

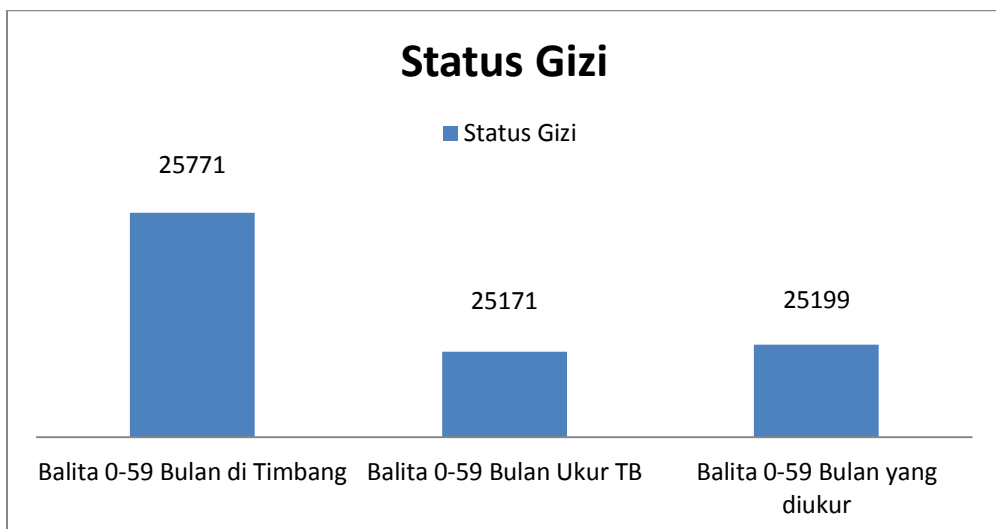
Dari grafik di atas diketahui jumlah kematian ibu hamil 2, ibu bersalin 4, ibu nifas 3, sehingga total secara keseluruhan berjumlah sebanyak 9 orang. Berbagai faktor dapat menyebabkan peningkatan kematian terhadap ibu.

F. Status Gizi

Status gizi merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan nutrisi yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan

masukannya nutrisi (Kemenkes, 2014). Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi harian yang harus dipenuhi, baik berdasarkan jumlah kalori yang dibutuhkan, maupun kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Pemantauan status gizi pada balita dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap posyandu adalah dengan menggunakan indikator memuat sasaran disuatu wilayah (S), balita yang memiliki KMS (K), balita yang ditimbang berat badannya (D), balita yang ditimbang dan naik berat badannya (N), disingkat menjadi SKDN. Pada tahun 2020 status gizi balita yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.6
Status Gizi di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

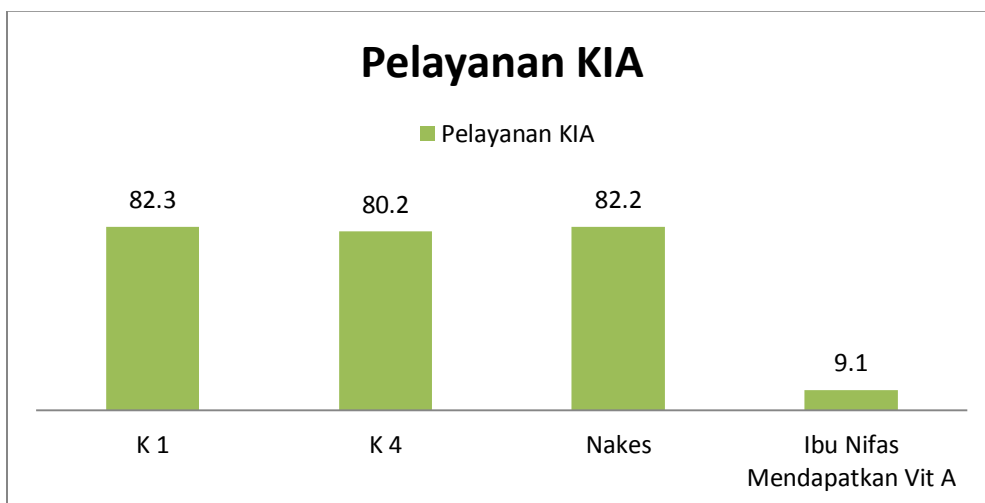
Dari grafik di atas diketahui jumlah balita yang ditimbang sebanyak 25.711, jumlah pengukuran tinggi badan sebanyak 25.171, dan jumlah balita yang diukur pada usia Balita 0-59 Bulan

sebanyak 25.199 orang. Sumber Berdasarkan laporan dari DINKES Kabupaten Padang Pariaman.

G. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

PWS KIA bertujuan untuk memantau secara rutin terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, mulai dari ANC sampai persalinannya serta kesehatan anaknya. Pemantauan yang dilaksanakan adalah pemantauan K1, K4, Deteksi Resti oleh Nakes, kunjungan neonatus, persalinan oleh Nakes. Pada tahun 2020 jumlah peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.7
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil Dinkes Tahun 2020

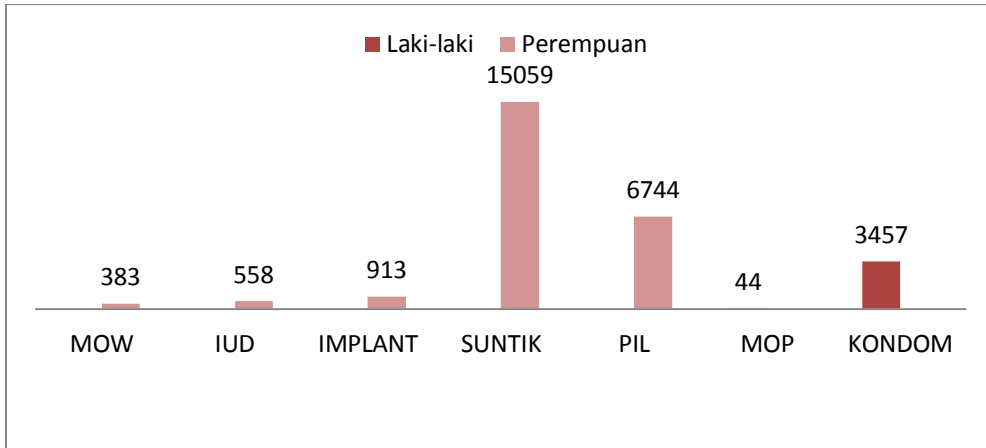
Dari grafik di atas diketahui jumlah pelayanan KIA sudah memenuhi target, yaitu K1 sebesar 7760 (82,3%) dan K4 sebesar 6983 (80,2%) serta ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan sebesar 6828 (82,2%) Ibu nifas yang mendapatkan Vitamin A sebesar 6833 (9,1%). Pencapaian ini terlaksana karena adanya jalinan kerjasama yang baik dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat antara puskesmas dan bidan praktek swasta (BPS) yang berpraktek diwilayah kerja puskesmas, sehingga kualitas dan kuantitas pemantauan dan pelaporan dari BPS ke Puskesmas lebih maksimal.

H. Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti: kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal anak, mengatur kehamilan, membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKKBN, 2015). Berikut ini data mengenai Akseptor Keluarga Berencana (KB) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.8
Cakupan Akseptor Keluarga Berencana (KB)
di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Profil DPPKB Tahun 2020

Dari grafik di atas diketahui jumlah penggunaan Suntik terhadap perempuan sebanyak 15059 orang dan penggunaan MOP pada laki-laki lebih rendah yaitu mencapai 44 orang yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V

PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu.

Setiap penduduk Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut adalah melalui pendidikan, dengan pencapaian pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (education for all) bagi usia tua dan muda, miskin maupun kaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Kabupaten Padang Pariaman status pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan jumlah sertifikasi guru, dimana kesenjangan gender dapat dilihat dari representasi perempuan dan laki-laki pada indikator tersebut.

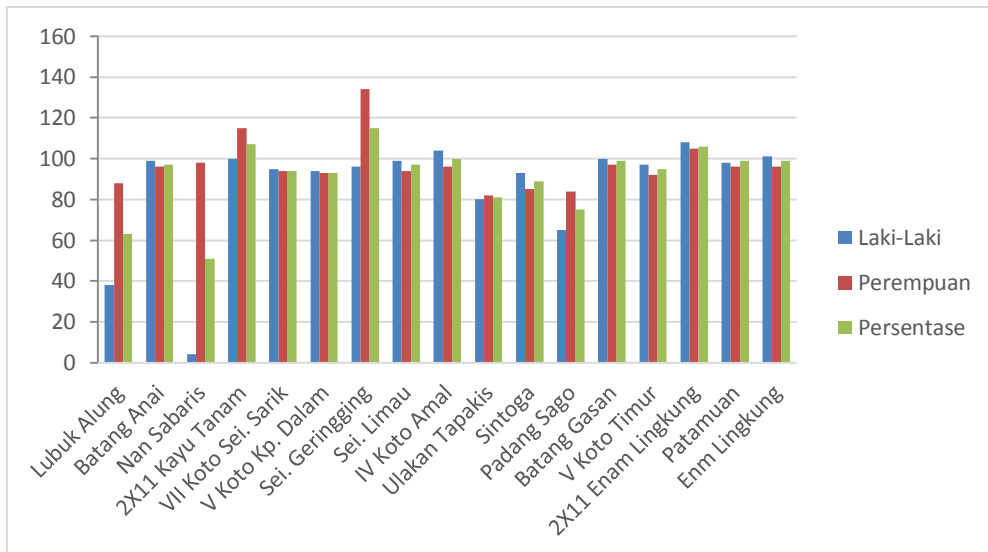
A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, angka APK dinyatakan dalam persentase. Angka hasil perhitungan tersebut (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Berikut ini data Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

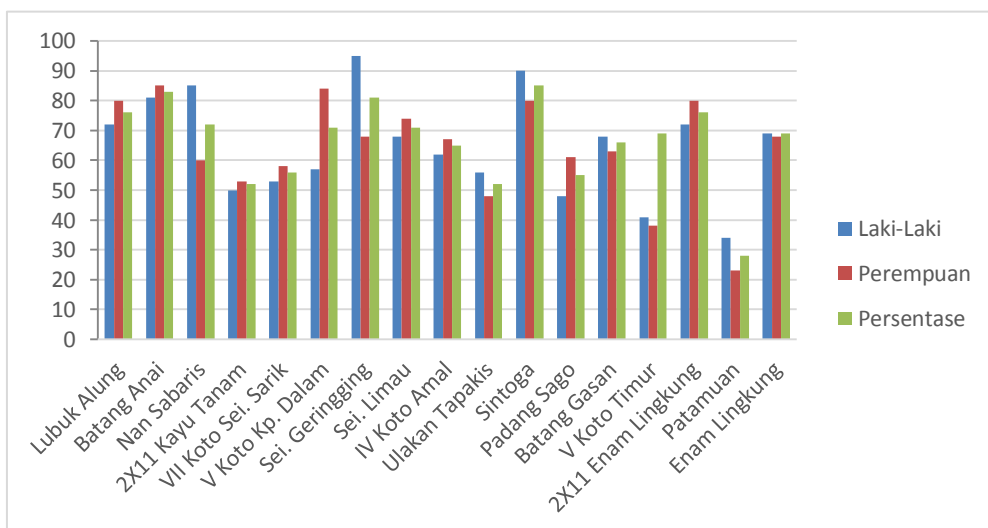
Grafik 5.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

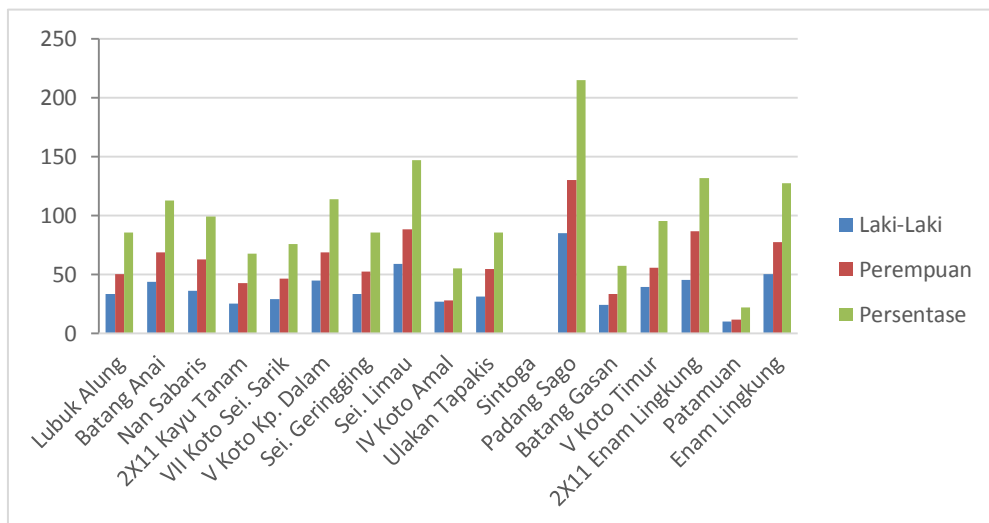


Grafik 5.2

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP



Grafik 5.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA



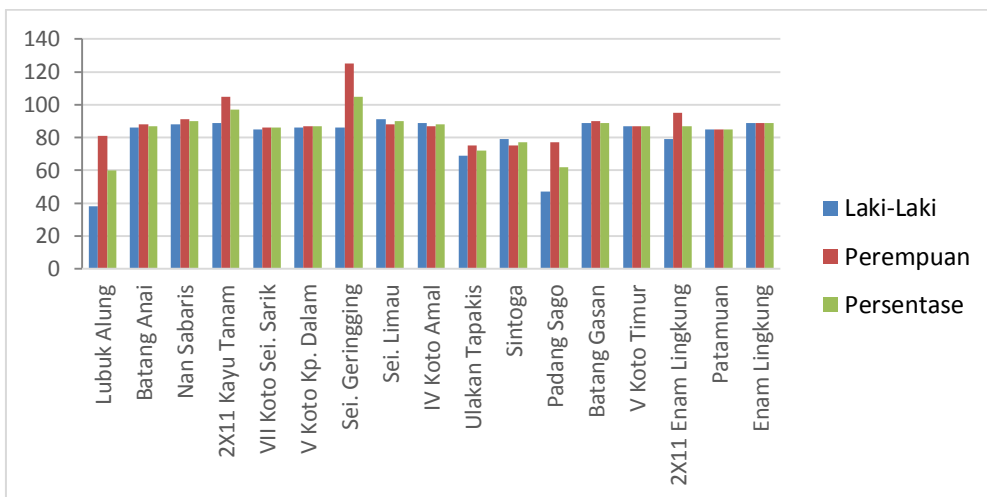
Berdasarkan data pada grafik di atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 APK yang tertinggi yaitu pada tingkat SD dengan angka 115 % di Kecamatan Sungai Geringging dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan dilihat dari data APK terendah yaitu pada jenjang pendidikan SMP yaitu dengan angka 28 % di Kecamatan Patamuhan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan pada jenjang pendidikan SMA jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terdapat di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 215,09 antara perempuan dan laki-laki.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

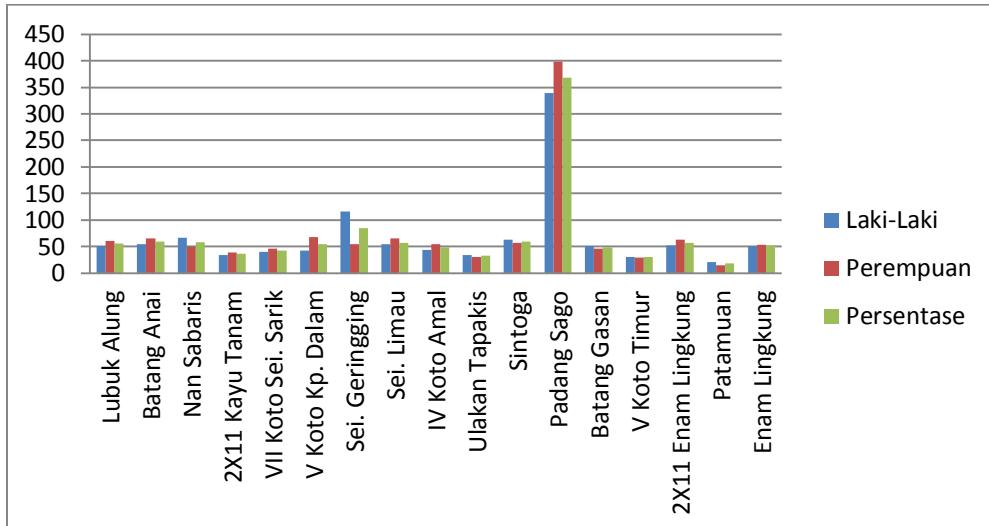
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia

sekolah. Angka Partisipasi Sekolah disuatu Wilayah atau Daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut ini data angka partisipasi sekolah (APS) menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

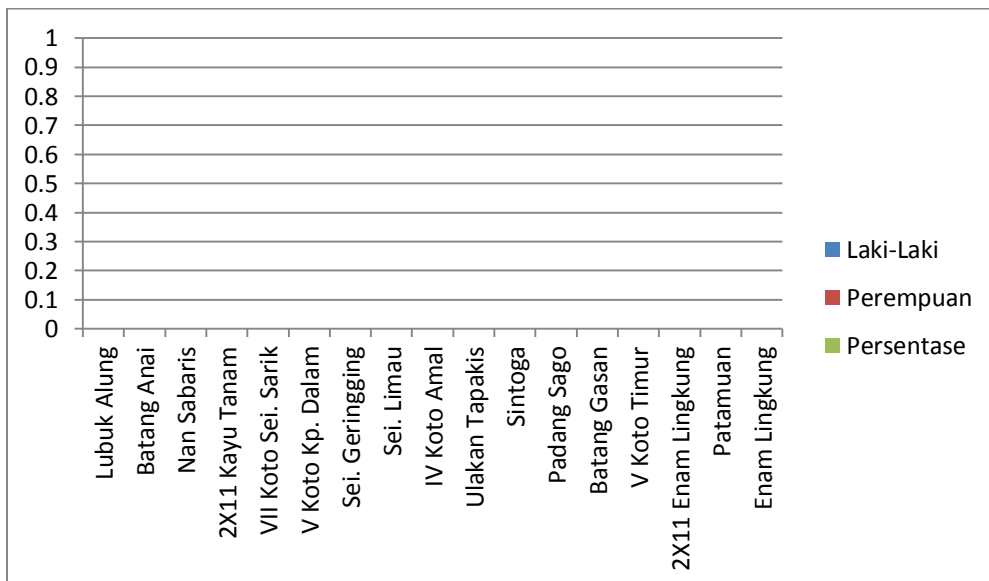
Grafik 5.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kelompok Umur (7-12 Tahun)



Grafik 5.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kelompok Umur (13-15 Tahun)



Grafik 5.6
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kelompok Umur (16-18 Tahun)

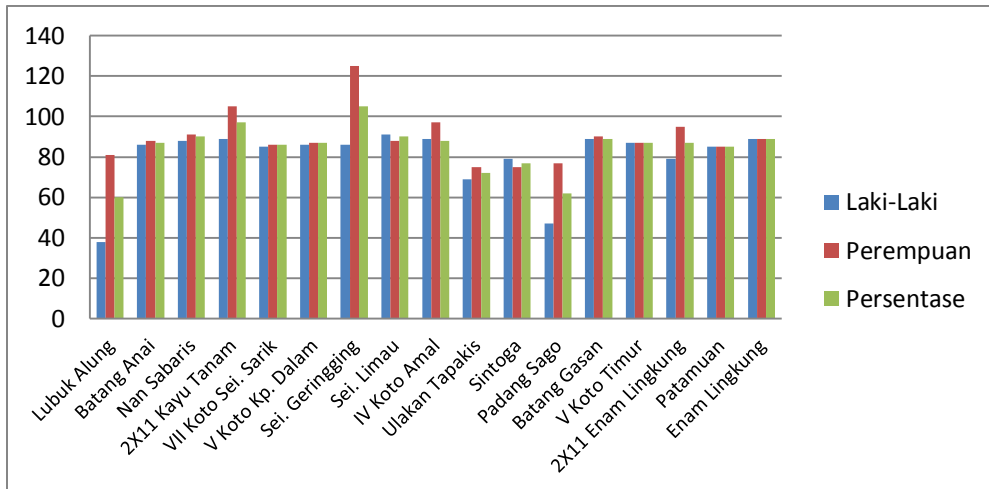


Berdasarkan data pada grafik di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 pada kelompok umur 7 – 12 Tahun terbanyak yaitu Kecamatan Sungai Geringging berjumlah 105 % pada kelompok umur 13 – 15 Tahun terbanyak yaitu Kecamatan Padang Sago berjumlah 368 % sedangkan kelompok umur 16 – 18 Tahun tidak diketahui secara keseluruhan karena data tidak tersedia.

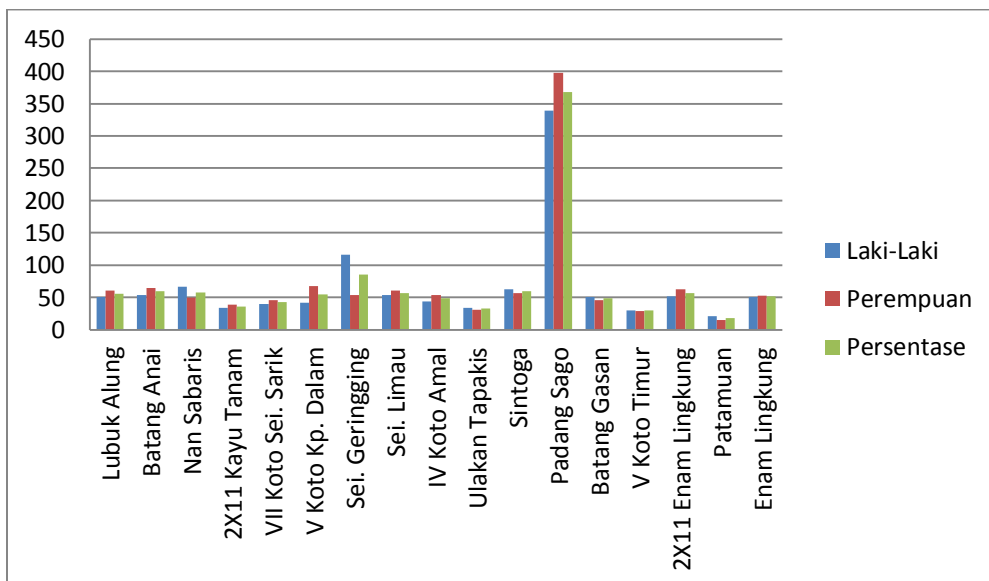
C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) sangat diperhitungkan. Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Berikut ini data Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

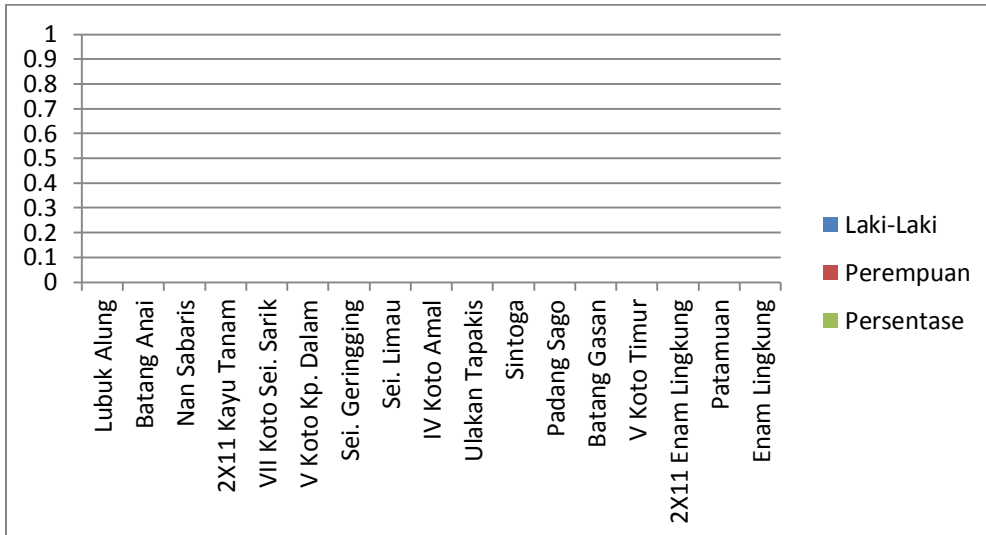
Grafik 5.7
Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan SD



Grafik 5.8
Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan SMP



Grafik 5.9
Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan SMA



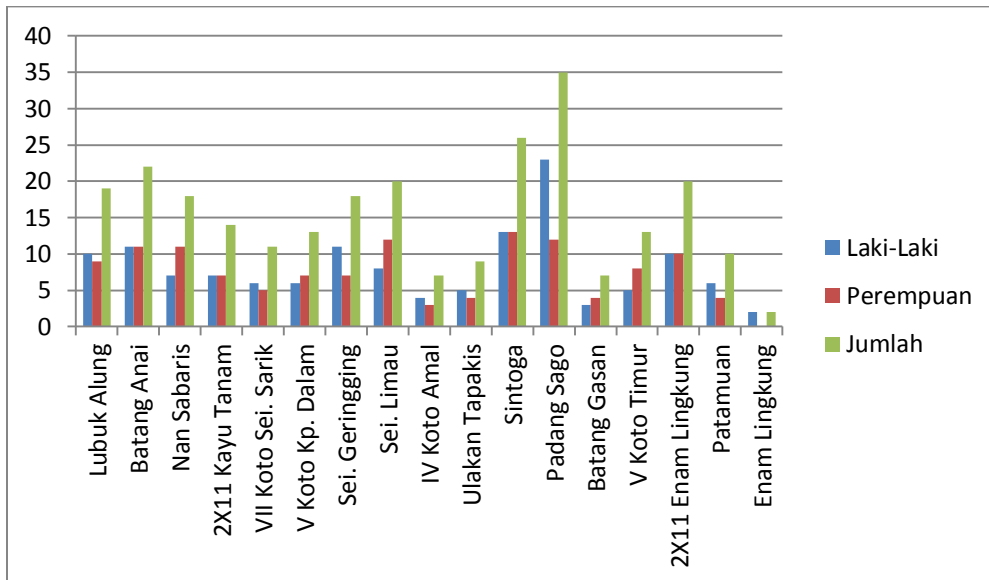
Berdasarkan data pada grafik 5.7, 5.8, dan 5.9 di atas Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 APM yang tertinggi yaitu Kecamatan Sungai Geringging pada tingkat SD dengan Angka 105 % dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan dilihat dari data Angka Partisipasi Murni terendah yaitu jenjang pendidikan SMP yaitu dengan angka 30 % di Kecamatan V Koto Timur dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan pada jenjang pendidikan SMA jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) tidak diketahui secara keseluruhan karena tidak tersedianya data.

D. Angka Putus Sekolah

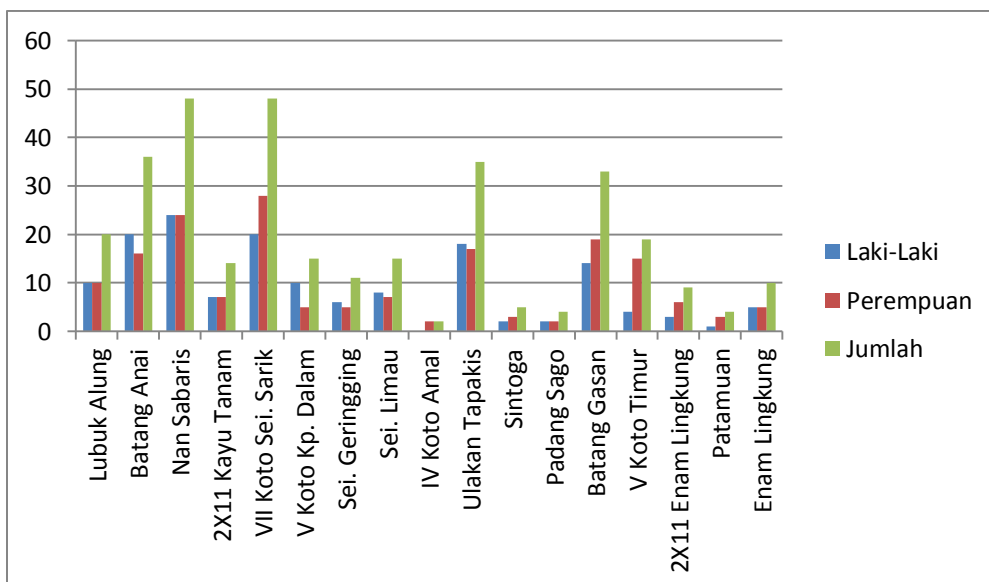
Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang atau anak yang keluar dalam suatu sistem pendidikan sebelum mereka menyelesaikan pendidikan pada waktunya. Berikut ini

data Angka Putus Sekolah menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

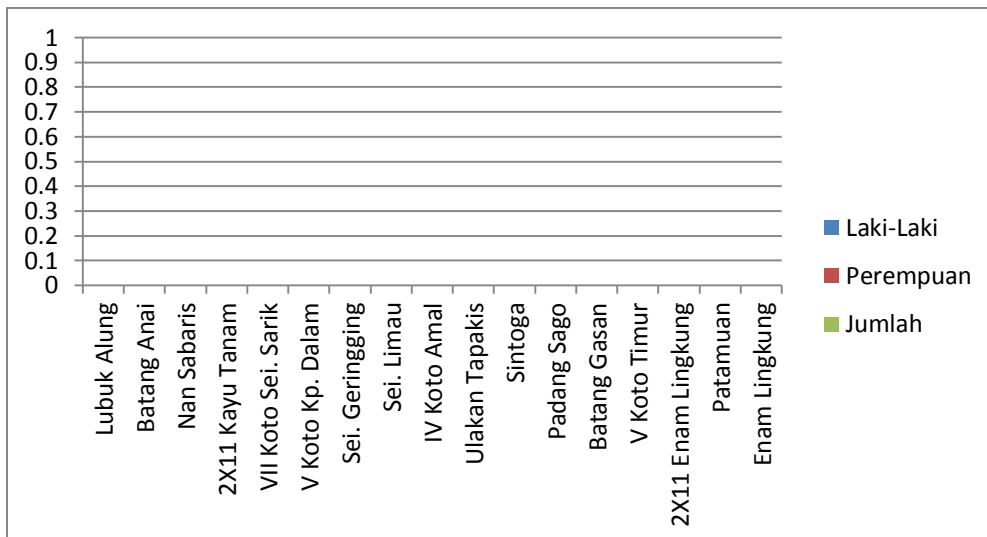
Grafik 5.10
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SD



Grafik 5.11
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SMP



Grafik 5.12
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SMA



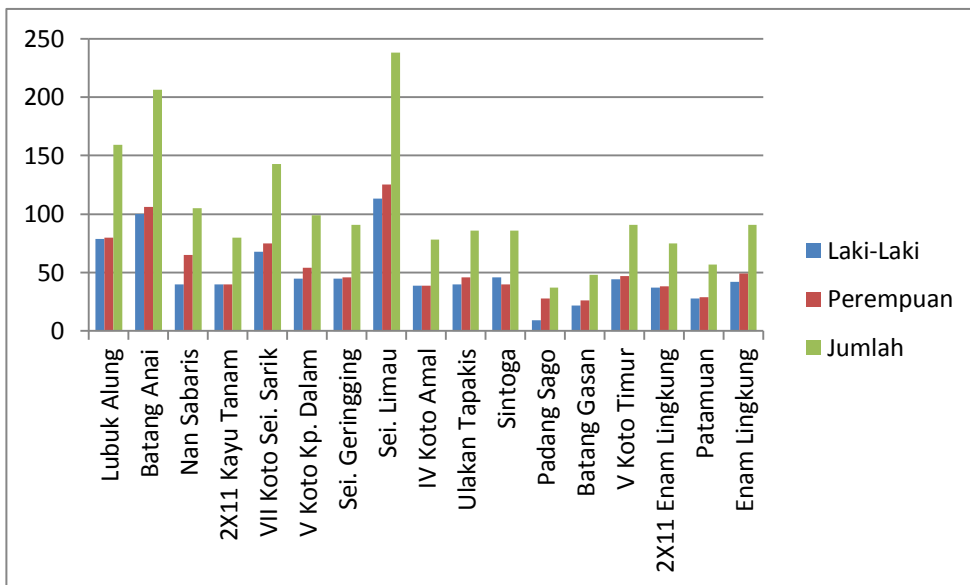
Berdasarkan data pada grafik 5.10, 5.11, dan 5.12 di atas Angka Putus Sekolah menurut Kecamatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020. Angka Putus Sekolah yaitu pada tingkat SD dengan angka 254 dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan dilihat dari data Angka Putus yaitu pada jenjang pendidikan SMP yaitu dengan angka 328 di Kabupaten Padang Pariaman dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan pada jenjang pendidikan SMA jumlah Angka Putus Sekolah tidak diketahui secara keseluruhan karena tidak tersedianya data.

E. Sertifikasi Guru

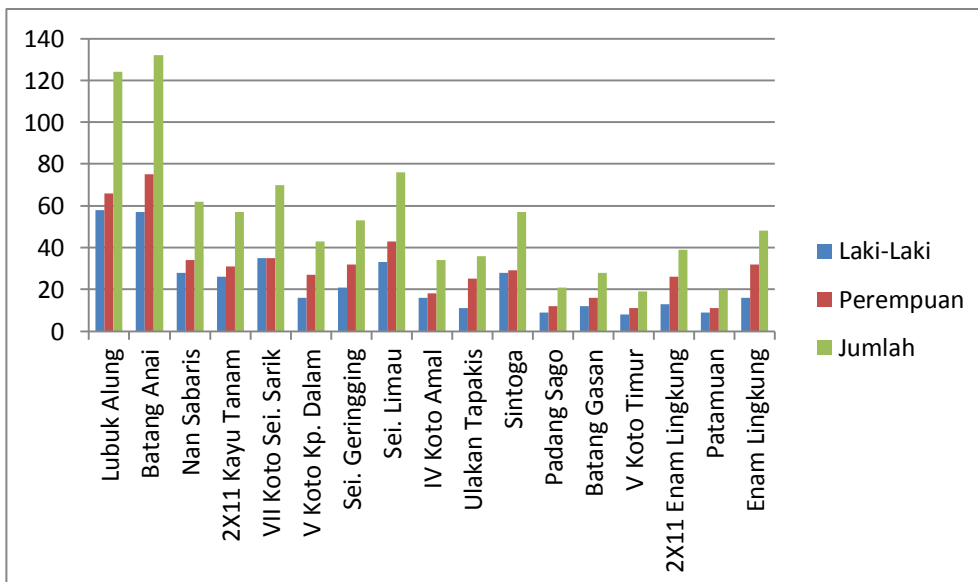
Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Tujuan utama dari sertifikasi guru ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi

kompetensi dalam standar kompetensi guru. Berikut ini data Sertifikasi Guru menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

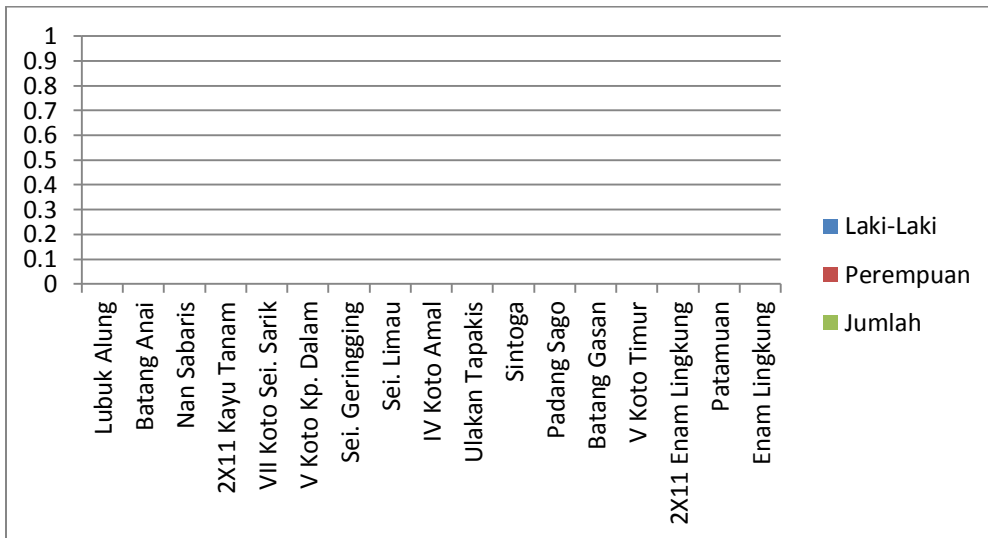
Grafik 5.13
Sertifikasi Guru pada Guru Sekolah Dasar (SD)



Grafik 5.14
Sertifikasi Guru pada Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Grafik 5.15
Sertifikasi Guru pada Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)



Berdasarkan data pada grafik 5.13, 5.14, dan 5.15 di atas jumlah Sertifikasi Guru menurut Kecamatan, dan Jenis Kelamin Tahun 2020. Dimana jumlah guru yang memiliki sertifikasi tertinggi yaitu di Kecamatan Sungai Limau berjumlah 238 orang diantaranya 113 laki-laki dan 125 perempuan, sedangkan guru yang bersertifikasi terendah yaitu di Kecamatan Padang Sago berjumlah 37 orang diantaranya 9 laki-laki dan 28 perempuan pada tingkat SD. Sedangkan pada tingkat SMP jumlah guru yang memiliki sertifikasi tertinggi yaitu di Kecamatan Batang Anai berjumlah 132 orang diantaranya 57 laki-laki dan 75 perempuan dan jumlah guru yang memiliki sertifikasi terendah yaitu di Kecamatan Padang Sago berjumlah 21 orang diantaranya 9 laki-laki dan 12 perempuan. Sedangkan pada tingkat SMA jumlah guru yang memiliki sertifikasi tidak diketahui karena data dukung tidak ada.

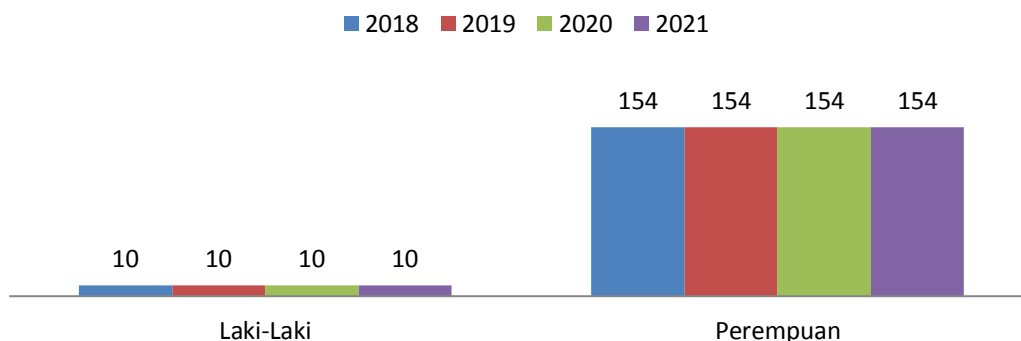
BAB VI KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Padang Pariaman status Ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: Tenaga Kerja Migran, Pekerja Sektor Formal, Pekerja Sektor Informal, Keanggotaan Koperasi, dan Serikat Pekerja.

A. Tenaga Kerja Migran

Tenaga kerja migran merupakan seseorang yang telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pekerja migran telah dilindungi oleh negara bagi pekerja yang hendak bekerja di dalam maupun luar negeri. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah pekerja migran pada setiap tahun selalu ada. Berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6.1
Tenaga Kerja Migran menurut Jenis Kelamin



Sumber Data : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja DPK2UKM 2020

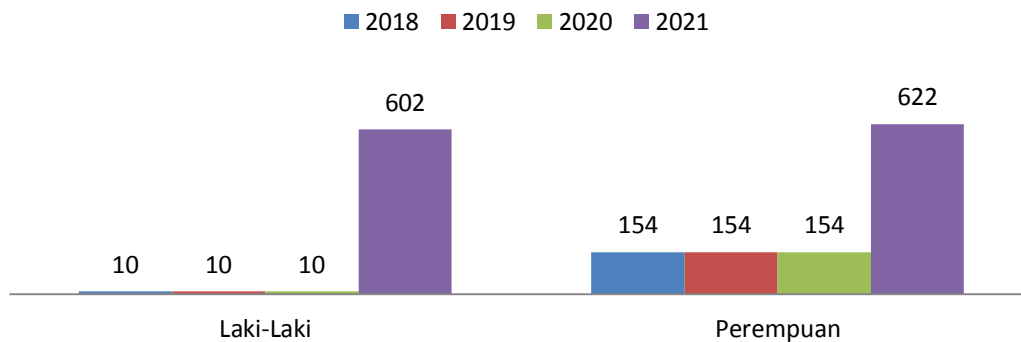
Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah tenaga kerja dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah sama diantaranya 10 laki-laki dan 154 perempuan.

B. Pekerja Sektor Formal

Pekerja di sektor formal merupakan pegawai (ASN) yang bekerja di instansi pemerintahan, pertanahan, jaminan sosial, bidang pendidikan, jasa kesehatan,

transportasi dan pergudangan , serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah pekerja sektor formal pada setiap tahun selalu ada. Berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6.2
Pekerja Sektor Formal menurut Jenis Kelamin



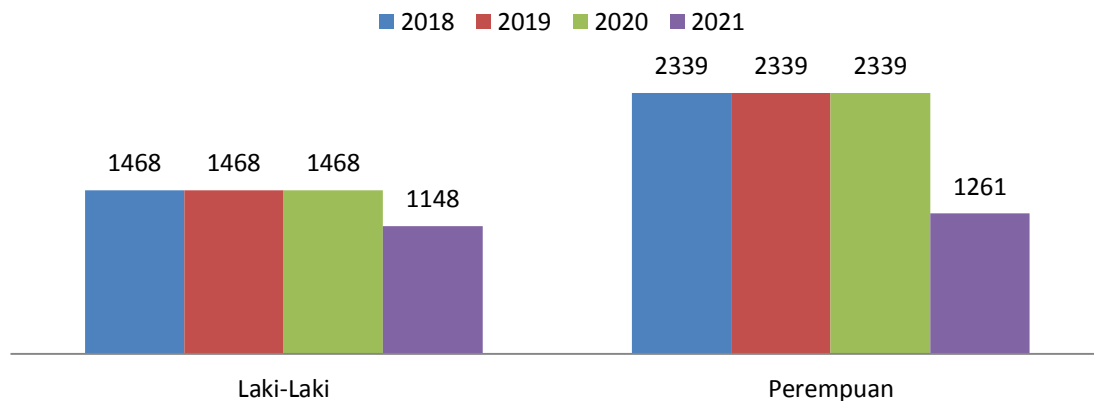
Sumber Data : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja DPK2UKM 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah pekerja sektor formal dari tahun 2018, 2019, 2020 sama dari tahun sebelumnya yaitu 10 Laki-laki dan 154 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pekerja sektor formal mengalami peningkatan yaitu 602 laki-laki dan 622 perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Pekerja Sektor Informal

Pekerja di sektor Informal merupakan seseorang yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Contoh pekerja informal : Pedagang Kaki Lima, Sopir Angkot, dan Tukang Becak. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah pekerja sektor informal pada setiap tahun selalu ada. Berikut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6.3
Pekerja Sektor Informal menurut Jenis Kelamin



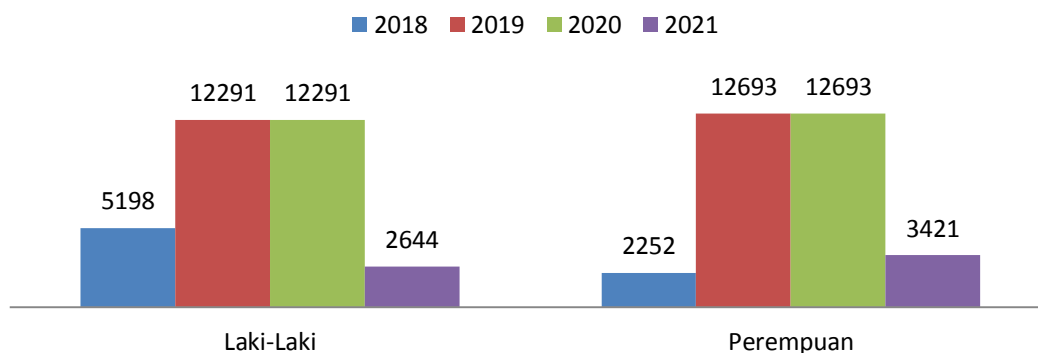
Sumber Data : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja DPK2UKM 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah pekerja sektor informal dari tahun 2018, 2019, 2020 sama dari tahun sebelumnya yaitu 1468 Laki-laki dan 2339 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pekerja sektor informal mengalami penurunan yaitu 1148 laki-laki dan 1261 perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Keanggotaan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pelaksanaan koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah keanggotaan Koperasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6.4
Keanggotaan Koperasi menurut Jenis Kelamin



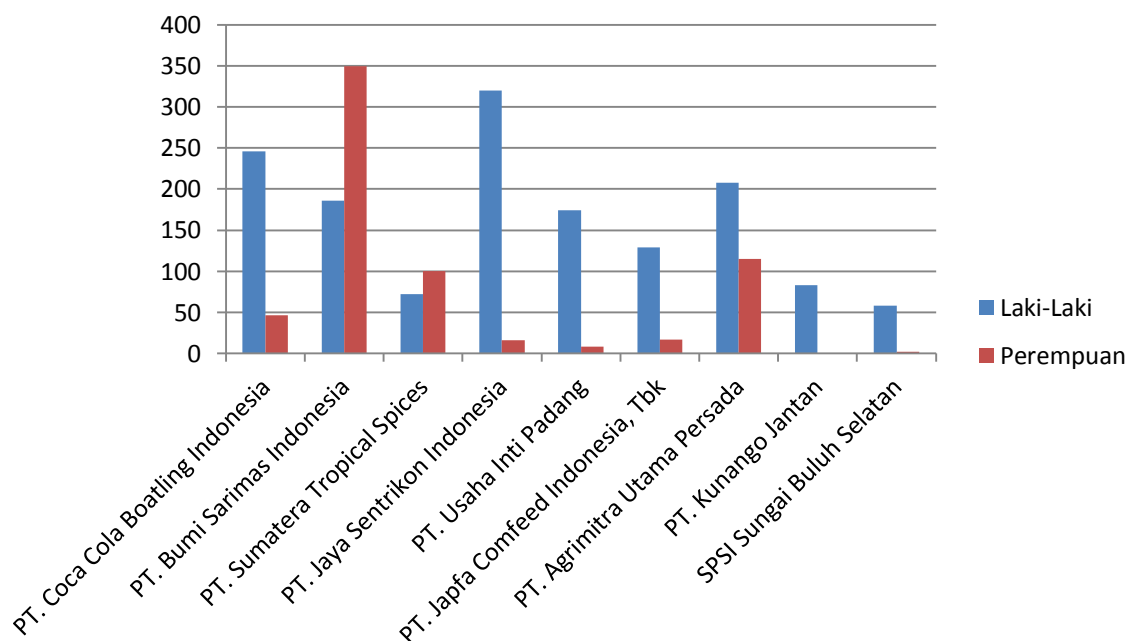
Sumber Data : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja DPK2UKM 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah pekerja sektor informal dari tahun 2018 yaitu 5198 Laki-laki dan 2252 Perempuan, jumlah keanggotaan koperasi pada tahun 2019, 2020 sama dari tahun sebelumnya yaitu 12291 Laki-laki dan 12693 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pekerja sektor informal mengalami penurunan yaitu 2644 laki-laki dan 3421 perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.

E. Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan organisasi yang hadir untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Serikat pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil dari penelitian Hernawan (2008:139) yang didasari dari Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tujuan didirikannya serikat pekerja lebih bersifat sosial ekonomi dari pada politis. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja, menyatakan bahwa tujuan didirikannya Serikat Pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah serikat pekerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6.5
Serikat Pekerja menurut Jenis Kelamin



Sumber Data : Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja DPK2UKM 2020

Berdasarkan data di atas jumlah serikat pekerja yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saat ini terdiri dari sembilan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 sama. Diantaranya PT. Bumi Sarimas Indonesia memiliki anggota serikat pekerja terbanyak yaitu 536 anggota. Sedangkan pada PT. Kunago Jantan berjumlah 60 anggota serikat pekerja lebih sedikit dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VII

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tatanan kehidupan publik, terutama dalam pengambilan keputusan. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan diseluruh negeri.

Pendidikan politik merupakan salah satu aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

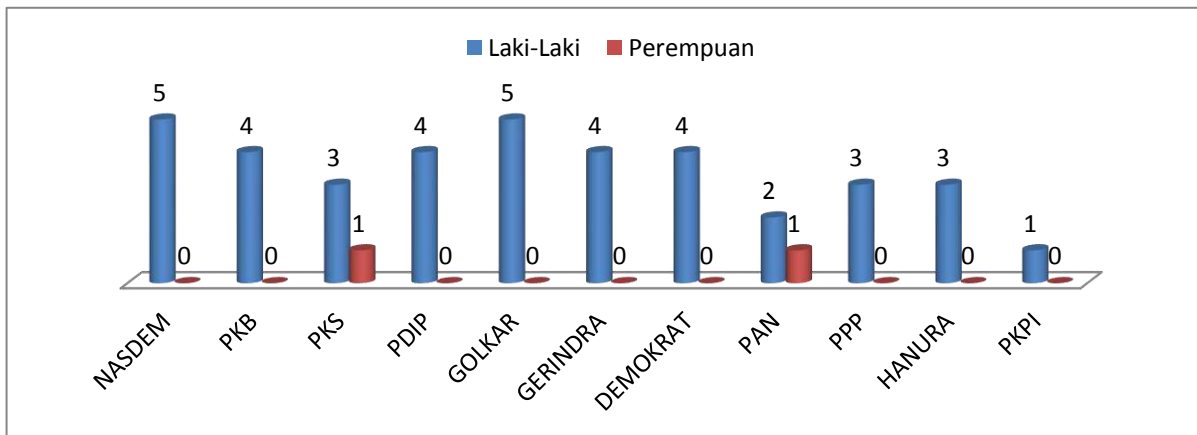
Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi malalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.

A. Partisipasi di Lembaga Legislatif

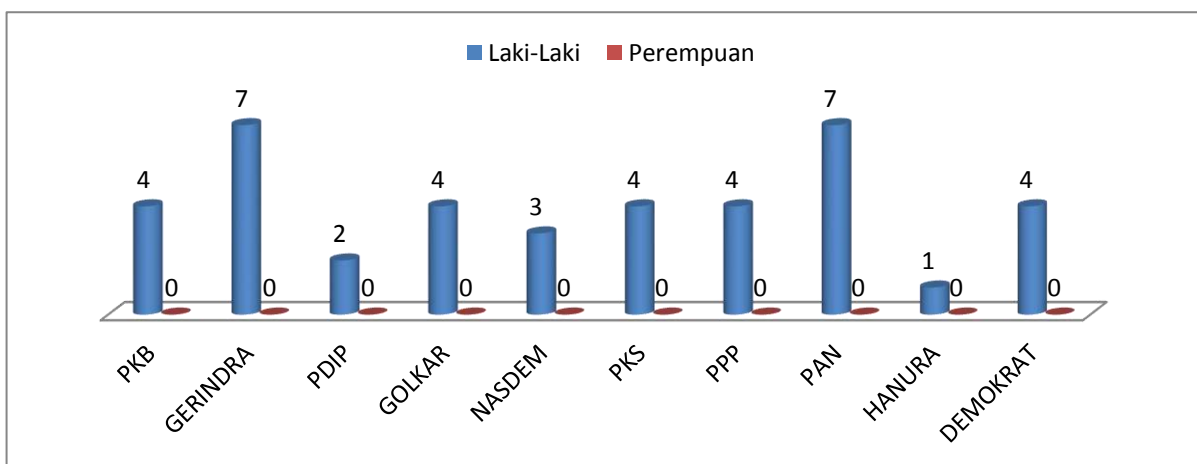
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah Anggota DPRD sebanyak 40 orang tanpa adanya keterwakilan perempuan. Berdasarkan perolehan data dari KPU Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari beberapa partai politik diantaranya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.1
Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Menurut Partai Politik



Sumber : Data KPU Tahun 2014



Sumber : Data KPU Tahun 2019

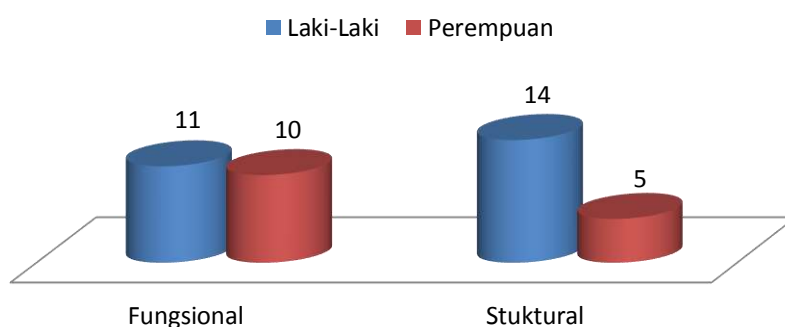
Berdasarkan dari kedua grafik di atas dapat dilihat adanya perbedaan jumlah Anggota Legislatif dari tahun sebelumnya. Dimana adanya jumlah keterwakilan anggota perempuan sebanyak 2 orang yaitu dari PKS dan PAN pada periode 2014 - 2019. Namun berbeda pada periode 2019 – 2024 tidak adanya keterwakilan perempuan yang menduduki kursi parlemen di Kabupaten Padang Pariaman. Peran keterwakilan perempuan pada parlemen seharusnya terpenuhi sebanyak 30 % untuk kuota caleg perempuan. Peran perempuan merupakan hal terpenting dalam kesetaraan gender. Serta membuat rancangan undang-undang berspektif gender. Contohnya RUU Penghapusan Kejahatan Seksual dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

1. Jaksa

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewang lain berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan data dari Kejaksaan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 jumlah Anggota Kejaksaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.2
Anggota Kejaksaan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Kantor Kejaksaan Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jumlah fungsional berjumlah 21 orang diantaranya 11 laki-laki dan 10 perempuan. Sedangkan jumlah struktural berjumlah 19 orang diantaranya 14 laki-laki dan 5 perempuan yang bertugas di Kantor Kejaksaan Pariaman.

2. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan data dari Pengadilan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 jumlah Anggota Hakim dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.3
Jumlah Hakim Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



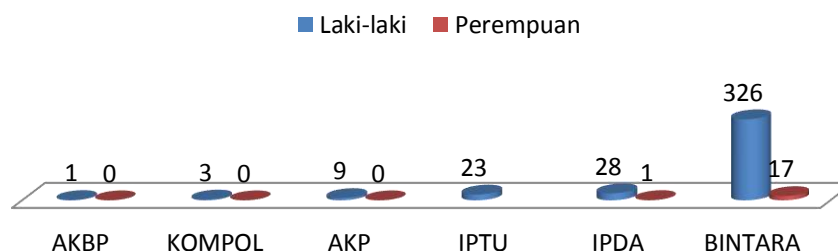
Sumber : Kantor Pengadilan Pariaman Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jumlah anggota kehakiman berjumlah 29 orang diantaranya 22 laki-laki dan 7 perempuan menurut Kantor Pengadilan Pariaman.

3. Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeriyang diatur dalam pasal 5 ayat (1). Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Padang pada tahun 2020 jumlah Anggota Kepolisian dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.4
Jumlah Polisi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Kepolisian Resort Padang Pariaman Tahun 2020

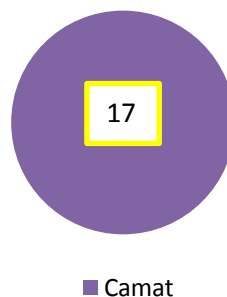
C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif

1. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab atas kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BKPSDM, jumlah Camat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.5

**Jumlah Camat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020**

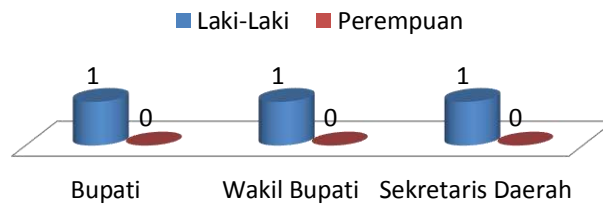


Sumber : BKPSDM Padang Pariaman Tahun 2020

2. Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat)

Dalam peraturan pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yang dalam pasal 14 ayat 1 menyatakan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah berganti nama menjadi Tim Penilai Kinerja PNS dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.6
Tim Baperjakat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020

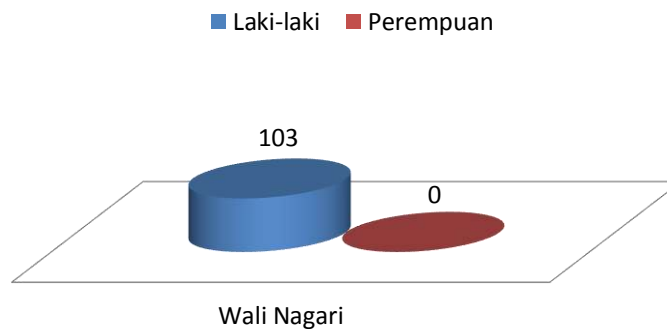


Sumber : BKPSDM Padang Pariaman Tahun 2020

3. Wali Nagari

Wali Nagari merupakan sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Jabatan wali nagari sama seperti kepala desa atau lurah. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMD, jumlah Wali Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 103 Nagari yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.5
Jumlah Wali Nagari Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : DPMD Padang Pariaman Tahun 2020

BAB VIII

KELANGSUNGAN HIDUP ANAK DAN LINGKUNGAN

Upaya perlindungan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman ternyata masih belum maksimal disebabkan oleh beberapa sehingga masih terjadi kekerasan yang dilakukan baik di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar. Kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh orang terdekat baik keluarga maupun orang-orang yang ada disekililing kita dengan berbagai tindak kasus kekerasan, diantaranya kekerasan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah atau incest.

Data perlindungan anak diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data-data yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Berikut ini data mengenai permasalahan anak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

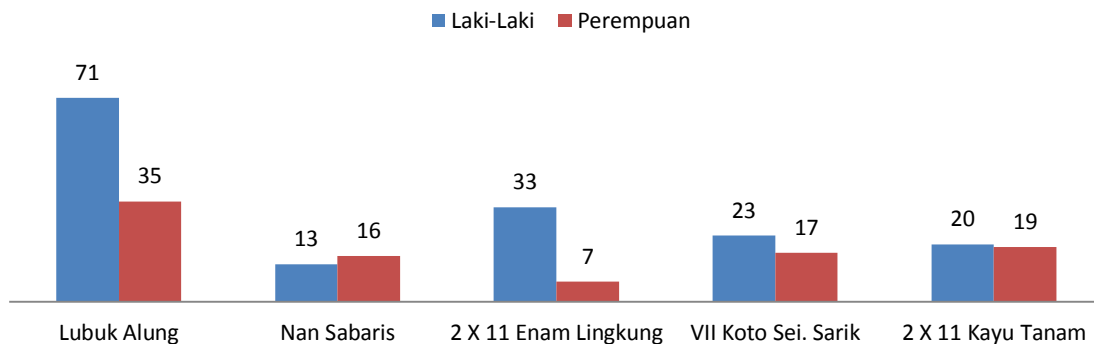
A. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

1. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan dalam keluarga. Sedangkan, pengasuhan alternatif merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya, dan anak-anak terlantar seperti panti asuhan dan tempat penitipan anak. Berikut ini jumlah anak yang ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Grafik 8.1
Anak yang di Panti dan Non Panti
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Bidang Rehsos DinsosP3A Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jumlah anak yang di Panti tertinggi yaitu di Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 71 laki-laki dan 35 perempuan. Sedangkan, data panti terendah yaitu di Kecamatan Nan Sabaris sebanyak 13 laki-laki dan 16 perempuan jumlah anak panti yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

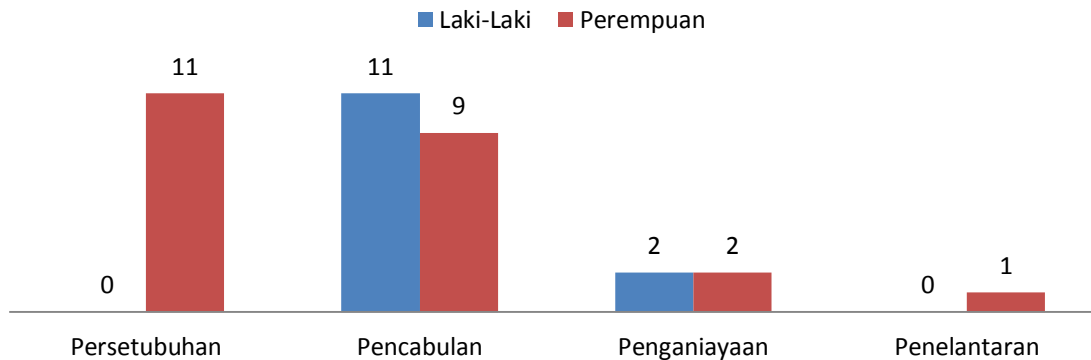
2. Respon Kasus Korban

Kekerasan lebih sering dialami oleh perempuan yaitu persetubuhan, pencabulan, penganiayaan dan penelantaran yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini disebabkan oleh :

- Kurangnya Ilmu Agama
- Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar
- Akibat pergaulan bebas
- Beredarnya situs pornografi dan pornoaksi
- Perilaku meraba-raba tubuh korban seperti cubitan, colekan, tepukan, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
- Menggodanya dan mengiming-imingi korban
- Pengaruh obat-obatan terlarang / NAPZA

Berikut ini kasus korban yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di Bawah ini.

Grafik 8.2
Respon Kasus terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020

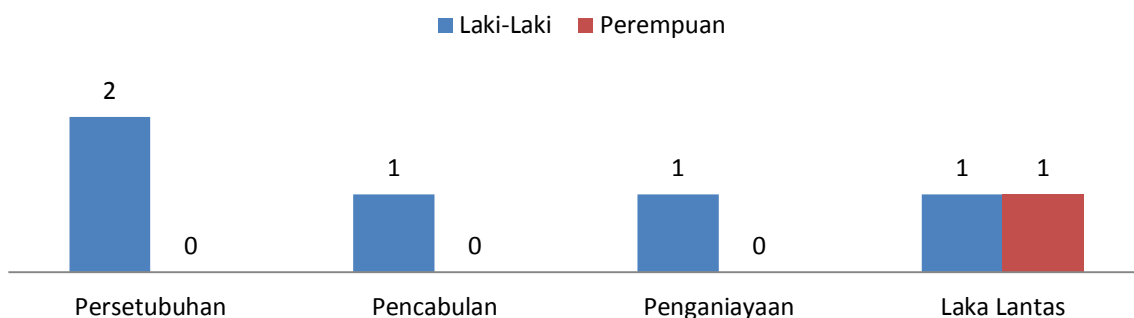


Sumber : Bidang PPA DinsosP3A Tahun 2020

3. Respon Kasus Pelaku

Pelaku kekerasan terhadap perempuan merupakan orang terdekat dengan korban karena orang-orang ini sangat memahami mengenai sifat, tingkah laku dan kebiasaan korban dan pelaku berasumsi bahwa korban tidak akan mengadu atau melaporkannya kepada keluarga, lingkungan maupun pihak berwajib. Berikut ini kasus pelaku yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di Bawah ini.

Grafik 8.3
Respon Kasus (Pelaku) terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Bidang PPA DinsosP3A Tahun 2020

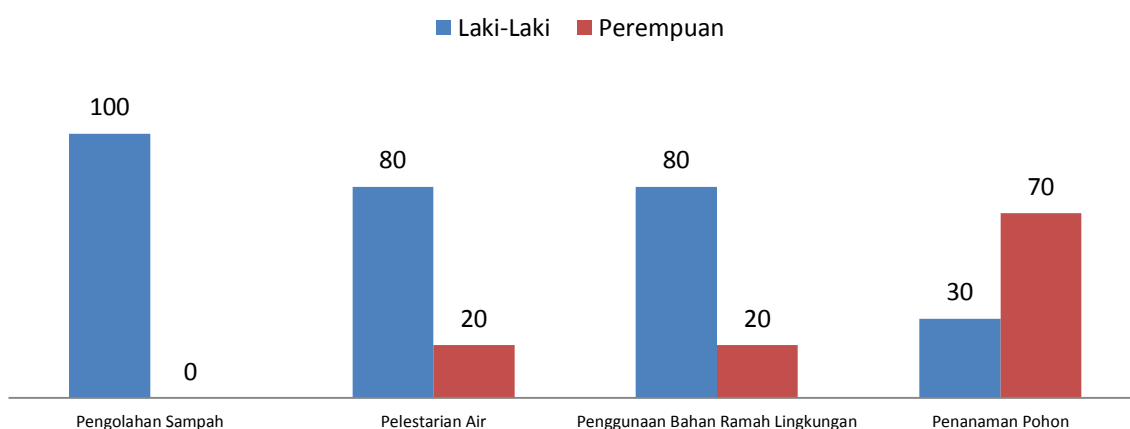
B. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi secara signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan efek rumah kaca pada atmosfer bumi. Kondisi iklim di Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis yang memiliki musim kering yang pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut.

Secara hidrologi potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Padang Pariaman tersedia lebih cukup karena dangkalnya air tanah di wilayah ini. Selain itu Padang Pariaman juga dilalui oleh 11 buah sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Batang Anai sepanjang 54,6 Km yang kontribusinya cukup besar dalam memenuhi kebutuhan akan air.

Secara geologis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia, yaitu Lempeng Eurasian dan Lempeng Indo-Australia dan topografinya yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai, maka Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang rawan bencana. Bencana yang pernah dan berpotensi terjadi di daerah ini yang identik dengan kondisi alam seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang, abrasi, gempa dan tsunami. Berikut ini perubahan iklim yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada grafik di Bawah ini.

Grafik 8.4
Perubahan Iklim Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020



Sumber : Dinas DLHKPP Tahun 2020

C. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Asmani, 2013). Selain itu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan (GPBL) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Berikut ini data kelompok wadah perempuan peduli lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1
Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020

No	Nama Kelompok	Nomor HP	Ketua
1	KWT Kenanga (2XII Kayu Tanam)	085263610338	Indrawati
2	KWT Pandan Wangi (2XII Kayu Tanam)	081363885965	Shofiah
3	KWT Mekar Sari (2XII Enam Lingkung)	082285071471	Martinah
4	KWT Kampung Apar (Batang Anai)	082171656754	Zetri
5	KWT Kukuran Saiyo (Padang Sago)		Zaenarwati
6	KWT Batu Tapo (V Koto Timur)	082392207563	Silvia
7	KWT Mama Ceria (Enam Lingkung)	085263781062	Nurkusuma Dewi
8	KWT Kelurahan Pintir Kayu Sunur (Ulakan Tapakih)		Ernawati

Sumber : Dinas DLHKPP Tahun 2020

BAB IX PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari OPD terkait masih belum terpenuhinya data yang tersedia mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa isu penting dan menjadi perhatian adalah.

1. Ketersediaan Data

- Menjadikan data terpilah sebagai isu strategis untuk diprogramkan dan dilaksanakan pada masing-masing OPD baik Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
- Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam mengatasi kesenjangan dan keadilan gender dalam bidang pembangunan secara spesifik.
- Meminimalisir panduan format dan deskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender pada tiap indikator pembangunan.

2. Isu mengenai Pemberdayaan Perempuan

➤ Peran Perempuan di Sektor Publik

Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan ikut aktif dalam peran dunia politik praktis (Legislatif) dimulai dari sekarang. Sehingga pada pemilu dimasa mendatang caleg perempuan siap berkompetisi dalam dunia politik.

➤ Kekerasan terhadap Perempuan

Pengkajian terhadap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan dan dibuat dan dilaksanakan pada instansi pemerintahan, apakah berpotensi menimbulkan diskriminasi serta tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Terus mengalami terjadinya kasus pada setiap tahunnya, tetapi hal ini tidak berarti ada terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Disisi lain, hal ini menunjukkan mulai adanya keberanian masyarakat terutama pada perempuan dan anak yang melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami kepada pihak yang berwajib.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat dari buku Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender (PUG) untuk dapat membuka dan membagi informasi dengan mudah dan efektif.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peranan dan keterlibatan lembaga-lembaga pengarusutamaan gender dan anak (PUG) dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Padang Pariaman.

Program penyusunan Buku Statistik Gender dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman diperlukan setiap tahun untuk mendorong ketersediaan data gender yang berkualitas disemua bidang instansi terkait. Diharapkan dan informasi gender nantinya merupakan data gender yang lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan. Dengan demikian dapat dijadikan bahan rujukan dalam perumusan kebijakan berupa perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.